

Penguatan Peran Pemerintah Distrik dan Kampung melalui Pendekatan Community Action Plan di Kabupaten Teluk Bintuni

Suleman Samuda Sangadji¹, Dian Aswita², Citra Puspita Tohamba³, Andi Asti Handayani⁴, Tuti Supatminingsih⁵

¹⁾ Institute for Public Accountability, Governance & Education (I-CARE), Indonesia

²⁾ Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³⁾ Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^{4,5)} Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Article Info

Article history

Received : Jan 03, 2026

Revised : Jan 18, 2026

Accepted : Jan 28, 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah distrik dan kampung dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas industri, keterbatasan kapasitas perencanaan di tingkat lokal, serta lemahnya koordinasi lintas kampung dan distrik dalam merumuskan arah pengembangan ekonomi pasca aktivitas utama industri. Melalui kegiatan ini, tim pelaksana memfasilitasi proses perencanaan partisipatif dengan menggunakan pendekatan Community Action Plan yang menempatkan pemerintah distrik dan kampung sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi permasalahan, memetakan potensi dan aset lokal, serta menyusun rencana aksi bersama. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui analisis situasi awal, diskusi kelompok terarah, lokakarya partisipatif, dan pendampingan dalam perumusan rencana aksi yang bersifat operasional dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap tantangan dan peluang pengembangan ekonomi kawasan, terpetakannya potensi lokal secara lebih sistematis, serta tersusunnya rencana aksi komunitas yang disepakati bersama. Dampak positif lainnya terlihat dari mulai menguatnya peran pemerintah distrik dan kampung dalam proses perencanaan ekonomi kawasan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kapasitas perencanaan partisipatif yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Abstract

This community service program aims to strengthen the role of district and village governments in supporting regional economic development in a natural resource-based area of Teluk Bintuni Regency, West Papua. The main challenges identified include a high level of economic dependence on industrial activities, limited local planning capacity, and weak coordination among villages and districts in formulating post-industry economic development strategies. Through this program, the implementation team facilitated a participatory planning process using the Community Action Plan approach, which positions district and village governments as the main actors in identifying problems, mapping local potentials and assets, and formulating collective action plans. The activities were carried out through an initial situational analysis, focus group discussions, participatory workshops, and facilitation in developing operational and context-specific action plans. The results indicate an improvement in participants' understanding of regional economic development challenges and opportunities, a more systematic identification of local potentials, and the formulation of community action plans agreed upon collectively. Another positive outcome is the strengthening role of district and village governments in regional economic planning processes. This program is expected to serve as an initial step toward strengthening sustainable participatory planning capacity to support regional economic development in Teluk Bintuni Regency.

Kata Kunci:

Community Action Plan;
Pengembangan Ekonomi
Kawasan;
Perencanaan Partisipatif;
Rencana Aksi;
Teluk Bintuni.

Corresponding Author:

Dian Aswita,
Pendidikan Biologi, FMIPA



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi kawasan di wilayah berbasis sumber daya alam sering kali menghadapi tantangan keberlanjutan ketika aktivitas utama industri mengalami fase penurunan atau berakhir. Kondisi ini tampak jelas di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, khususnya di distrik Weriagar, Tomu, dan Taroi, yang selama ini mengalami ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap keberadaan proyek LNG Tangguh (Komite-Tiap, 2025; Tim-Redaksi, 2025). Proses demobilisasi tenaga kerja pasca selesainya proyek Train 3 memunculkan risiko sosial-ekonomi (Komite-Tiap, 2023), terutama bagi masyarakat kampung dan pemerintah distrik yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas perencanaan dan konsolidasi program ekonomi alternatif berbasis potensi lokal. Kondisi ini menempatkan pemerintah desa dan distrik dalam posisi dilematis, di satu sisi mereka dituntut memberikan solusi mata pencaharian bagi warga terdampak demobilisasi, namun di sisi lain mereka menghadapi keterbatasan instrumen teknokratis untuk merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengembangan ekonomi wilayah perdesaan bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan lemahnya mekanisme perencanaan partisipatif dan rendahnya kemampuan aktor lokal dalam mengintegrasikan potensi ekonomi, kelembagaan, serta sumber pendanaan ke dalam rencana aksi yang operasional (Ghassani et al., 2023; Haridison et al., 2022; Mairiza & Noviarita, 2023; Selvia et al., 2025). Dalam konteks Teluk Bintuni, permasalahan tersebut tercermin pada keterbatasan data aktual di tingkat kampung, lemahnya koordinasi lintas kampung dan distrik, serta minimnya konsolidasi program antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan aktor non-negara di luar forum formal seperti musrenbang. Akibatnya, intervensi ekonomi yang dilakukan sering kali bersifat sporadis, parsial, dan tumpang tindih, sehingga gagal menciptakan ekosistem usaha yang tangguh untuk menopang kemandirian masyarakat pasca-berakhirnya proyek migas.

Merespons kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk workshop penguatan peran distrik dan kampung dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kampung, Baperkam, Pemuda, Pengelola BUMKAM/BUMDES, dan Pemerintah Distrik. Kegiatan ini tidak diarahkan sebagai forum sosialisasi kebijakan program sosial Tangguh LNG dan Program pembangunan 3 distrik semata, melainkan sebagai ruang pembelajaran (*peer to peer learning*) yang mendorong pemerintah distrik dan kampung berperan aktif sebagai subjek perencanaan. Melalui peran aktif ini, intervensi pengabdian bertujuan untuk mengubah mentalitas ketergantungan menjadi kemandirian, di mana aktor lokal tidak lagi sekadar menjalankan instruksi dari atas (*top-down*), melainkan mampu melahirkan inisiatif ekonomi yang memiliki legitimasi sosial kuat dan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) tinggi di tengah masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Community Action Plan* (CAP), yang menempatkan masyarakat dan pemerintah lokal (Pemerintahan Kampung dan Pemerintah Distrik) sebagai aktor utama dalam seluruh siklus perencanaan, mulai dari analisis situasi hingga perumusan rencana tindak lanjut (Fitrintitia, 2025). Pendekatan ini relevan karena CAP tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen rencana, tetapi juga pada proses penguatan kapasitas, pembentukan kesepakatan kolektif, serta komitmen implementasi lintas pemangku kepentingan (Fadli & Sarofah, 2021). Dalam praktiknya, CAP dalam kegiatan ini dijalankan melalui tahapan pemetaan sosial dan ekonomi, diskusi tematik berbasis focus group discussion, penyusunan Detail Intervention Design, hingga perumusan collaborative implementation program dalam bentuk *microproject*.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, implementasi CAP juga berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan nasional yang mendorong partisipasi masyarakat sebagai komponen fundamental. Dalam konteks ini, perencanaan tidak dipahami sebagai proses teknokratis semata, melainkan sebagai proses

sosial yang membutuhkan partisipasi aktif aktor lokal agar program tersebut memiliki legitimasi, relevansi, dan keberlanjutan. Pendekatan partisipatif semacam ini telah lama ditekankan dalam literatur pembangunan sebagai prasyarat bagi terbentuknya aksi kolektif dan kepemilikan program oleh masyarakat (Chambers, 1994; Kurt Lewin, 1946).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan pendekatan CAP dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan fokus pada penguatan peran pemerintah distrik dan kampung dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model pengabdian berbasis perencanaan partisipatif, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai implementasi CAP dalam konteks wilayah berbasis sumber daya alam.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 5 hari bertempat di Teluk Bintuni dengan melibatkan peserta di 3 wilayah distrik, dengan komposisi peserta setiap kampung meliputi unsur Pemerintah Kampung, BAPERKAM, Pengurus BUMKAM/BUMDES, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Perempuan. Adapun lokasi kegiatan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Lokasi Kegiatan

No	Distrik	Kampung
1	Distrik Weriagar	a. Kampung Weriagar
		b. Kampung Weriagar Utara
		c. Kampung Weriagar Selatan
		d. Kampung Weriagar Baru
		e. Kampung Mogotira
		f. Kampung Tuanaikin
2	Distrik Tomu	a. Kampung Sebyar Rejosari
		b. Kampung Tomu
		c. Kampung Wanagir
		d. Kampung Ayot
		e. Kampung Ekam
		f. Kampung Adur
		g. Kampung Totitra
3	Distrik Taroi (Distrik Pemekaran)	a. Kampung Taroi
		b. Kampung Tambanewa
		c. Kampung Perapera
		d. Kampung Sorondauni

Kegiatan ini dirancang dan dilaksanakan menggunakan pendekatan Community Action Plan (CAP), yaitu suatu kerangka kerja partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perumusan rencana aksi, hingga penguatan kapasitas untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program (Hamdi & Goethert, 1997). Pendekatan ini dipilih karena konteks wilayah sasaran Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kawasan berbasis sumber daya alam dengan struktur ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas industri ekstraktif, sehingga membutuhkan proses perencanaan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga berakar pada pengalaman, pengetahuan lokal, dan aspirasi komunitas.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan dan pemetaan awal, yang dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan telaah dokumen perencanaan daerah serta laporan-laporan kegiatan sebelumnya. Tahap ini berfungsi untuk memahami konteks sosial-ekonomi kawasan, aktor-aktor kunci yang terlibat, serta dinamika pembangunan ekonomi lokal yang sedang berlangsung. Dalam literatur, fase ini dikenal sebagai *situational analysis*, yang penting untuk memastikan bahwa intervensi program tidak berdiri di ruang hampa dan selaras dengan realitas lokal (Kinson et al., 2007).



Gambar 1: Alur Tim Memberikan Materi dalam Pelatihan

Tahap berikutnya adalah fasilitasi partisipatif melalui diskusi kelompok terarah, lokakarya, dan forum dialog multipihak yang melibatkan perwakilan pemerintah distrik dan kampung, masyarakat lokal, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Proses ini tidak hanya diarahkan untuk “mentransfer pengetahuan” secara satu arah, melainkan membuka ruang refleksi bersama mengenai tantangan pembangunan ekonomi kawasan, peluang diversifikasi ekonomi, serta peran yang dapat diambil oleh masing-masing aktor. Pendekatan partisipatif semacam ini secara luas diakui efektif dalam meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) masyarakat terhadap rencana aksi yang dihasilkan (Chambers, 1994; Mansuri & Rao, 2013).

Berdasarkan hasil proses partisipatif tersebut, kegiatan kemudian difokuskan pada perumusan rencana aksi komunitas yang bersifat operasional dan kontekstual. Rencana aksi disusun secara kolaboratif dengan menekankan pada kejelasan tujuan, pembagian peran, serta tahapan implementasi yang realistis. Dalam konteks CAP, rencana aksi tidak diposisikan sebagai dokumen normatif semata, melainkan sebagai alat kerja sosial yang dapat terus diperbarui seiring dengan perubahan kondisi dan kapasitas lokal (Green & Haines, 2017).

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan kombinasi indikator kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan melalui tingkat partisipasi peserta, keterlibatan aktor lokal dalam proses perencanaan, serta jumlah rencana aksi yang berhasil dirumuskan secara bersama. Sementara itu, secara kualitatif, evaluasi difokuskan pada perubahan pemahaman peserta mengenai pembangunan ekonomi kawasan, meningkatnya kapasitas reflektif pemerintah kampung dan distrik, serta kualitas dialog antar pemangku kepentingan. Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pengabdian berbasis komunitas tidak selalu dapat direduksi menjadi angka semata, tetapi juga tercermin dalam proses sosial (kualitas dialog) yang terbentuk, kapasitas adaptif aktor lokal, serta proses pembelajaran kolektif yang terbentuk selama perumusan rencana aksi tersebut (Patton, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan berlandaskan pendekatan Community Action Plan (CAP) sebagai kerangka operasional penguatan peran Pemerintah Distrik dan Kampung dalam pengembangan ekonomi kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni. Implementasi kegiatan ini mencakup: (a) fasilitasi peningkatan pemahaman aparatur distrik dan kampung mengenai perencanaan ekonomi kawasan berbasis potensi lokal; (b) pendampingan penyusunan dokumen rencana aksi komunitas yang selaras dengan dokumen perencanaan formal; dan (c) penguatan mekanisme koordinasi multipihak antara pemerintah lokal, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Pendekatan ini menempatkan pemerintah distrik dan kampung tidak semata sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai *local development enablers* yang

mampu memobilisasi sumber daya sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat tapak.

Secara konseptual, CAP tidak hanya sebagai alat perencanaan yang mengatur, tetapi juga sebagai proses sosial yang mendorong pembelajaran bersama dan tindakan kolektif. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan perencanaan yang berorientasi pada tindakan, seperti yang dijelaskan oleh (Hamdi & Goethert, 1997), yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan dalam konteks komunitas seharusnya dipahami sebagai proses yang berulang, yang terus disesuaikan dengan kapasitas, pengalaman, dan perubahan lokal. Dengan pemahaman ini, tujuan PKM ini dalam memperkuat peran pemerintah distrik dan kampung sebagai penggerak proses perencanaan telah tercapai.

Penguatan Kapasitas Pemerintah Distrik dan Kampung

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah distrik dan kampung dalam memahami dan mempraktikkan perencanaan ekonomi kawasan berbasis potensi lokal. Melalui rangkaian diskusi terarah, lokakarya partisipatif, dan fasilitasi penyusunan rencana aksi, aparatur lokal mulai mampu mengidentifikasi keterkaitan antara persoalan ekonomi kampung dengan struktur dan peluang ekonomi kawasan yang lebih luas. Lebih lanjut (Muslim & Kurniawan, 2020) memvalidasi hal ini, dengan mencatat bahwa CAP membutuhkan keterlibatan pemerintah, warga, organisasi sosial, dan swasta.

Tabel 2. Hasil evaluasi pre-test dan post test

Dimensi Kapasitas	Indikator Evaluasi Utama	Skor Rata-Rata		Perubahan
		Pre-test	Post-test	
Pemahaman Konseptual	Pemahaman konsep ekonomi kawasan dan potensi lokal	40	80	Meningkat Terjadi peningkatan pemahaman aparatur terhadap konsep ekonomi kawasan dan pendekatan berbasis potensi lokal
Kapasitas Analitis-Reflektif	Kemampuan menganalisis keterkaitan antar kampung dan persoalan ekonomi wilayah	33	70	Meningkat Signifikan Aparatur mulai mampu melihat masalah ekonomi kampung dalam konteks kawasan dan hubungan struktural lintas wilayah
Kapasitas Aplikatif-Praksis	Kemampuan menyusun rencana aksi ekonomi kolaboratif	45	70	Meningkat Aparatur mampu merumuskan rencana aksi ekonomi yang lebih realistis dan terhubung antar kampung
Sikap dan Orientasi Perencanaan	Orientasi terhadap perencanaan partisipatif dan kolaboratif	46	80	Meningkat Signifikan Terjadi perubahan sikap aparatur menuju penerimaan perencanaan ekonomi kawasan berbasis kolaborasi

Perubahan ini menunjukkan bahwa peran aparatur kampung dan distrik telah berubah dari sekadar menerima dan menerjemahkan program menjadi membantu masyarakat berpikir dan menetapkan prioritas. Hasil ini sejalan dengan konsep *good enough governance* yang diusulkan oleh (Grindle, 2004). Menurut konsep ini, peningkatan kapasitas institusional secara bertahap merupakan kemajuan penting dalam proses pembangunan wilayah yang berkembang, meskipun dampak ekonomi yang diukur belum dihasilkan secara langsung. Oleh karena itu, penguatan kapasitas reflektif dan perencanaan aparatur lokal dapat dianggap sebagai dasar awal untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Selain itu, proses CAP dalam kegiatan ini mencerminkan prinsip *Problem-Driven Iterative Adaptation* (PDIA) sebagaimana dikemukakan oleh (Andrews et al., 2017) di mana kapasitas kelembagaan dibangun melalui pemecahan masalah nyata secara bertahap dan kontekstual. Aparatur distrik dan kampung tidak diarahkan untuk mengikuti cetak biru perencanaan tertentu, melainkan didorong untuk mengidentifikasi persoalan spesifik wilayahnya dan merumuskan solusi yang realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia.



Gambar 2: Pelaksanaan Workshop Penguatan Peran Distrik dan Kampung

Perencanaan Partisipatif dan Integrasi Ekonomi Kawasan

Terciptanya rencana aksi komunitas yang menggabungkan kebutuhan dan potensi kampung dengan rencana pembangunan ekonomi wilayah adalah salah satu capaian utama kegiatan ini. Proses CAP mendorong pergeseran strategi perencanaan dari pola *top-down* ke strategi partisipatif yang berfokus pada aksi kolektif. Rencana aksi yang dibuat lebih dari sekadar daftar proyek, hal ini juga mencakup logika solusi yang mengaitkan potensi lokal dengan rantai nilai ekonomi lokal.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan partisipatif yang berorientasi pada aksi cenderung menghasilkan tingkat komitmen yang lebih tinggi dibandingkan perencanaan yang bersifat konsultatif semata. (Mansuri & Rao, 2013) menunjukkan bahwa partisipasi yang dirancang untuk menghasilkan aksi nyata memiliki peluang lebih besar untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Dalam konteks Teluk Bintuni, CAP berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan pemerintah distrik dan kampung membangun kesepahaman bersama mengenai arah pengembangan ekonomi kawasan pasca aktivitas industri utama. Hasil ini sejalan dengan pendekatan *place-based development*, yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis aset dan karakteristik lokal, dari perspektif pembangunan wilayah. Potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari sistem ekonomi regional yang saling terhubung melalui integrasi antar kampung.

Dinamika Kelembagaan dan Kolaborasi Multipihak

Pelaksanaan CAP dalam kegiatan PKM ini turut mempengaruhi dinamika kelembagaan dan pola hubungan antaraktor pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah distrik mulai memainkan peran yang lebih aktif sebagai simpul koordinasi lintas kampung, terutama dalam menyelaraskan rencana aksi komunitas dengan program dan kebijakan pembangunan daerah. Perubahan ini mencerminkan prinsip *collaborative governance*, di mana proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dilakukan melalui interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam forum yang relatif setara. Kolaborasi yang efektif ditopang oleh dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama, yang seluruhnya muncul dalam proses CAP yang difasilitasi dalam kegiatan ini (Ansell & Gash, 2008; Hidayat, 2024; Valencia & Oppusunggu, 2022). Dengan demikian, CAP dapat dipandang sebagai arena institusional yang memperkuat relasi kolaboratif antara pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan belum merata dan masih bergantung pada individu tertentu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan institusional yang lebih sistematis agar praktik kolaboratif tidak bersifat temporer, sebagaimana dikritisi dalam literatur partisipasi yang menyoroti risiko *elite capture* dan ketergantungan pada aktor kunci. Hal ini sejalan dengan penelitian (Regmi et al., 2016) bahwa manfaat CAP sering kali sebagian besar dinikmati oleh elit dan individu yang berpengaruh daripada populasi yang rentan. Sehingga menurut (Parashar et al., 2011) CAP harus berbasis masalah, berbasis komunitas, partisipatif, dan bertahap agar berhasil.

**KERANGKA ANALISIS PROGRAM BERSAMA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Distrik: Werigar Teluk Bintuni
Kabupaten: Werigar Teluk Bintuni

No	Bidang	Tujuan	Output	Program	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Peta Pihak	Waktu
1	Ekonomi Produktif	Peningkatan Keupatimaan Masyarakat	Sarana alat tangkap • perahu • motor • jang	Peningkatan Keupatimaan masyarakat nelayan	Bantuan alat tangkap ulang dan Pelatihan Pembuatan alat tangkap ulang	Masyarakat Hukum Adat Distrik Werigar		RKP	
2	Ekonomi Produktif	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan	Sarana Pengolahan pasca Produksi • Siling • freezer • Chest • Icepack	Pengolahan hasil produksi	Bantuan alat pengolahan produksi ulang	Masyarakat Hukum Adat Distrik Werigar		RKP	
3	Perataan Pemukiman	Peningkatan Keupatimaan masyarakat	Peningkatan sarana fasilitas Umum Kampung Nelayan	Perataan Pemukiman Kampung Nelayan	Sarana Perataan Fasilitas Umum Kampung Nelayan	Masyarakat Hukum Adat Distrik Werigar		RKP	
4	Ekonomi Produktif	Peningkatan ketahanan ekonomi desa	Peningkatan kapasitas unit usaha BUMDes/Sumbar	Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Pengembangan BUMDES/SUMBAR	Masyarakat Hukum Adat Distrik Werigar		KEMENDESA PDT	
5			Jaring Pemaman Hasil BUMKAM	Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Sarana Pelatihan dan Pemaman Hasil BUMKAM	Masyarakat Hukum Adat Distrik Werigar		KEMENDESA PDT	
6		Peningkatan	Bantuan Modal	Penguatan	Bantuan Modal	Masyarakat		KEMENDESA	

Gambar 3: Kerangka Analisis Program Bersama Distrik Werigar

Evaluasi Berbasis Proses dan Pembelajaran Kolektif

Kegiatan PKM ini tidak dirancang untuk mengukur dampak ekonomi secara langsung, melainkan berfokus pada perubahan proses, kapasitas, dan kualitas tata kelola perencanaan. Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan gagasan *developmental evaluation* yang dikemukakan oleh (Patton, 2011), yang menekankan bahwa dalam intervensi pembangunan yang kompleks dan kontekstual, keberhasilan tidak selalu tercermin dalam indikator kuantitatif jangka pendek.

Dalam konteks Teluk Bintuni, capaian utama kegiatan tercermin pada meningkatnya kualitas dialog antar pemangku kepentingan, terbentuknya pemahaman bersama mengenai tantangan dan peluang ekonomi kawasan, serta tersusunnya rencana aksi komunitas yang memiliki legitimasi sosial. Pembelajaran kolektif yang terjadi selama proses CAP menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi kawasan.

KESIMPULAN

Penerapan pendekatan CAP dalam pengabdian masyarakat ini membuktikan bahwa kendala utama pengembangan ekonomi kawasan bukanlah keterbatasan sumber daya, melainkan lemahnya koordinasi dan perencanaan kolektif. Melalui kerangka kerja partisipatif yang terstruktur, CAP berhasil mengubah pola kerja aktor lokal yang awalnya terfragmentasi menjadi kolaborasi inklusif. Pendekatan ini terbukti mampu mengidentifikasi potensi lokal secara lebih kontekstual dibandingkan pendekatan *top-down*.

Kendati demikian, keberhasilan penyusunan rencana aksi hanyalah langkah awal. Agar inisiatif ini memiliki keberlanjutan yang realistis, dokumen CAP yang dihasilkan harus segera dilembagakan melalui integrasi formal ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau prioritas Musrenbang Distrik, sehingga mendapatkan jaminan alokasi anggaran (Dana Desa atau CSR). Oleh karena itu, rekomendasi praktis bagi kegiatan pengabdian selanjutnya adalah bergeser dari fase perencanaan ke fase inkubasi teknis (*technical assistance*), seperti pendampingan manajemen usaha dan akses pasar. Selain itu, diperlukan pengembangan model monitoring partisipatif untuk mengawal implementasi program, memastikan bahwa transisi ekonomi masyarakat berjalan sesuai peta jalan yang telah disepakati.

REFERENSI

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability Evidence, Analysis, Action* (Vol. 6, Issue 11). Oxford University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Fadli, Y., & Sarofah, R. (2021). The Possibilities for an Urban Community Action Plan and Collaborative Work Support for Slum Improvement: A Case Study in Jakarta. *Policy & Governance Review*, 5(3), 206. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.391>
- Fitrintia, I. S. (2025). Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat- Studi Kasus CAP (Community Action Plan) di

- Kelurahan Kramat. *Cities and Urban Development Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/cudj.v3i1.1035>
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2023). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48–55. <https://doi.org/10.22146/mgi.75432>
- Green, G. P., & Haines, A. (2017). *Asset Building & Community Development*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781483398631>
- Grindle, M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 17(4), 525–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Hamdi, N., & Goethert, R. (1997). Action Planning for Cities: A Guide to Community Practice. In *The Journal of Land & Public Utility Economics* (Vol. 21, Issue 1). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.2307/3158939>
- Haridison, A., Iskandar, D., & Gaffar, U. H. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85–101. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14208>
- Hidayat, W. (2024). Community Action Plan (CAP) Dalam Penataan Kawasan Kumuh Desa Laut Dandang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.59637/jsti.v21i01.407>
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. Routledge.
- Komite-Tiap. (2023). *Tanggung Independent Advisory Panel Final Report on Operations and Tangguh Expansion Project* (Issue June). https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/en_id/indonesia/home/news/reports/2023_en_tiap_report.pdf
- Komite-Tiap. (2025). *Tanggung LNG: Proyek Besar, Risiko Gede*. <https://re-course.org/publications/tanggung-Ing-bahasa/>
- Kurt Lewin. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb0295.x>
- Mairiza, K. T., & Noviarita, H. (2023). Meningkatkan Kemampuan Green Economy Dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 6(02), 40–53. <https://doi.org/10.56998/jr.v6i02.98>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing Development: Does Participation Work? In The World Bank (Ed.), *Localizing Development*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Muslim, A., & Kurniawan, T. (2020). Community Action Plan (Cap) Dalam Penataan Kawasan Kumuh Dari Perspektif Good Urban Governance: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 5(1), 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1023>
- Parashar, S., Sharma, A., & Shaw, R. (2011). From action planning to community-based adaptation. In *Community, Environment and Disaster Risk Management* (Vol. 6, Issue 2011, pp. 163–182). Emerald. [https://doi.org/10.1108/S2040-7262\(2011\)0000006015](https://doi.org/10.1108/S2040-7262(2011)0000006015)
- Patton, M. Q. (2011). Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. In *The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences*. Guilford Press. <https://doi.org/10.4135/9781412972024.n727>
- Regmi, B. R., Star, C., & Leal Filho, W. (2016). An overview of the opportunities and challenges of promoting climate change adaptation at the local level: a case study from a community adaptation planning in Nepal. *Climatic Change*, 138(3–4), 537–550. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1765-3>
- Selvia, S. I., Danasari, I. F., Fitri, N., Maulin, Sukma, L. H., Pratama, M. G., Akbar, Z. I. A., & Program. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekarsari Lombok Barat Melalui Perencanaan Desa Berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1303–1310. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i3.2457>
- Tim-Redaksi. (2025). *Suku Sebyar Masih Terpinggirkan di Tengah Kekayaan LNG Tangguh*. Media Pro Rakyat. [https://mediaprorakyat.com/2025/10/31/suku-sebyar-masih-terpinggirkan-di-tengah-kekayaan-Ing-tangguh/#:~:text=Suku Sebyar Masih Terpinggirkan di Tengah Kekayaan LNG Tangguh - Media Pro Rakyat](https://mediaprorakyat.com/2025/10/31/suku-sebyar-masih-terpinggirkan-di-tengah-kekayaan-Ing-tangguh/#:~:text=Suku%20Sebyar%20Masih%20Terpinggirkan%20di%20Tengah%20Kekayaan%20LNG%20Tangguh,-Media%20Pro%20Rakyat)
- Valencia, P., & Oppusunggu, R. E. (2022). Peningkatan Kualitas Permukiman di Semper Timur RW 10 melalui Aksi Masyarakat. *Jurnal Strategi Desain Dan Inovasi Sosial*, 4(1), 20–37. <https://dx.doi.org/10.37312/jsdis.v4i1.5301>